

Pragmatisme Politik Luar Negeri Amerika dalam Pemberlakuan *Lend-Lease Act 1941*

=====
Oleh: Alia Azmi

ABSTRACT

This article explains the role of the philosophy of pragmatism in American foreign policy and its development during the eve of World War II when Germany began to expand his power in Europe. Pragmatism is one of the philosophies that influence American thinking, which is embedded in its society. By elaborating the attitudes that are based on pragmatism and the political history of American foreign policy, the author explains American foreign policy to maintain its national interests even if it was contrary to its foreign policy means. The policy can be seen in the enactment of Lend-Lease Act which allows the U.S. President to provide military assistance to countries involved in the European war at the end of 1930s and the beginning of 1940s, despite the U.S. being in a neutral position on the war in Europe.

Kata Kunci: pragmatisme, pragmatisme politik, politik luar negeri

I. PENDAHULUAN

Pada akhir dekade 1930-an, Jerman di bawah pimpinan Hitler mulai meningkatkan kekuatannya dengan mengekspansi negara-negara lain di Eropa. Jerman kemudian berhasil menguasai wilayah-wilayah seperti Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Perancis pada Juni 1940, dan memaksa Inggris untuk mundur menarik angkatan udaranya dari wilayah-wilayah tersebut. Dengan keberhasilan ini, tentara Jerman sudah mencapai Dunkirk yaitu pelabuhan di Perancis di tepi Selat Channel yang berseberangan langsung dengan Inggris. Inggris pada saat itu harus berjuang sendiri untuk mempertahankan wilayahnya. Namun Inggris berhasil meminta bantuan peralatan perang dari Amerika, walaupun Inggris belum

melunasi utang perangnya. Presiden Roosevelt bersedia memberikan bantuan peralatan militer dengan sistem *cash and carry*, di mana Inggris harus menjemput sendiri peralatannya dan membayar tunai.

Pada bulan Agustus hingga September berlangsunglah Battle of Britain, yaitu perang mempertahankan Inggris melawan serangan udara Jerman. Inggris akhirnya berhasil memenangkan pertempuran walaupun dengan kekuatan lebih kecil daripada Jerman. Dengan kemenangan Inggris ini, Jerman harus membatalkan semua rencana invasinya.

Walaupun Inggris berhasil mengalahkan Jerman dalam *Battle of Britain*, Jerman tetap mengadakan penyerbuan-penyerbuan di Selat

Channel dengan tujuan mengaramkan atau menahan kapal-kapal dagang Inggris. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill akhirnya meminta bantuan Presiden Roosevelt untuk membantu militer Inggris yang mulai melemah karena perang. Inggris tidak mampu lagi untuk membeli peralatan dengan sistem *cash and carry* karena tidak memiliki uang dan kapal untuk mengangkut peralatan.

Di bulan September 1940, Roosevelt dan Churchill sempat mengadakan perjanjian *Destroyers for Bases Agreement*, yaitu pemberian 50 buah kapal penghancur (*destroyer*) yang ditukarkan dengan penggunaan teritorial Inggris di Newfoundland (Kanada) dan beberapa tempat di Karibia sebagai basis angkatan udara dan laut Amerika. Akhirnya Roosevelt mengusulkan pada Kongres untuk memberikan bantuan peralatan pada Inggris yang dibayar dengan apapun selain uang, agar Inggris tidak menimbun utang lagi. Pada Februari 1941 Presiden Roosevelt mengajukan proposal untuk memberikan bantuan pada Inggris – dengan alasan bahwa bantuan tersebut dilakukan demi menjaga kepentingan dan keamanan AS dari ekspansi fasisme – yang kemudian disahkan oleh Kongres.

Pada tanggal 11 Maret 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt menandatangani *Lend-Lease Act*, yaitu peraturan yang memberikan kekuasaan pada presiden untuk meminjamkan, menjual, menyewakan, dan memberikan peralatan militer kepada setiap negara yang dianggap penting bagi pertahanan AS, terutama dalam berperang melawan poros Axis; Jerman, Italia,

dan Jepang. Bentuk pembayaran tidak harus berupa uang, seperti dalam hal Inggris yang meminjamkan basis militernya. Selain itu, pinjaman atau utang dapat dikembalikan setelah perang berakhir.

Pinjaman peralatan militer ini awalnya hanya diberikan pada Inggris ini akhirnya diberikan juga pada negara-negara lain, seiring perkembangan perang di Eropa. Kekalahan Uni Soviet atas negara kecil Finlandia, membuat keadaannya tampak lebih parah, sehingga Presiden Roosevelt memberikan bantuan dengan skema *lend-lease* pada Uni Soviet. Sampai dengan berakhirnya perang, pinjaman ini telah diberikan pada 40 negara dengan jumlah mencapai US\$ 41 miliar, di mana Inggris mendapatkan pinjaman paling besar yaitu \$30 miliar, diikuti Uni Soviet \$11 miliar dan Cina \$1 miliar. Kurang dari \$10 miliar di antaranya tidak pernah diganti, sehingga lebih tampak seperti donasi.

Bantuan Amerika pada negara-negara ini melalui *Lend-Lease Act* merupakan salah satu langkah awal yang melibatkan Amerika ke dalam Perang Dunia II, dengan kata lain mengakhiri isolasionisme Amerika yang telah diterapkannya sejak puluhan tahun. Kebijakan ini juga dianggap berperan dalam menyebabkan kekalahan poros Axis beberapa tahun berikutnya.

Sebelum diberlakukannya *Lend-Lease Act*, di Amerika berlaku *Neutrality Act* yang dibuat dari tahun 1935 hingga 1937 yang melarang Amerika untuk meminjamkan dan memperdagangkan peralatan militer pada negara-negara yang ikut perang.

Hal ini merupakan bentuk isolasionisme Amerika yang pada saat itu menghindari terlibat peperangan yang sedang terjadi di Eropa.

Selain itu, di Amerika saat itu juga berlaku *The Johnson Act 1934*, yaitu peraturan yang melarang Amerika untuk memberikan pinjaman dan menjual senjata pada negara yang belum melunasi utangnya pada AS akibat Perang Dunia I, yaitu Inggris dan Prancis.

Dengan diberlakukannya *Lend-Lease Act*, timbul kontroversi dari dalam negeri Amerika karena dianggap bertentangan dengan politik luar negeri isolasionisme Amerika saat itu. Kebijakan tersebut memberikan posisi baru pada Amerika yaitu sebagai pemberi bantuan pada negara-negara yang terlibat perang. Hal ini tidak sesuai dengan politik luar negeri Amerika yang sejak berakhirnya Perang Dunia I menghindari intervensi perang. Pada awalnya terdapat penolakan dari publik dan sebagian anggota Kongres akan kebijakan tersebut. Akan tetapi, pendukung peraturan tersebut menganggap bahwa *Lend-Lease Act* adalah tindakan yang tepat untuk menjaga keamanan Amerika, karena apabila poros Allies, yaitu sekutu Amerika; Inggris, Rusia, dan Prancis jatuh ke tangan Jerman dan sekutunya, posisi Amerika akan berada dalam bahaya juga.

Dari peristiwa ini dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri Amerika berubah-ubah tergantung pada faktor-faktor penentu kebijakan, khususnya di sini kondisi politik dan keamanan dunia pada saat itu. Bahkan kebijakan *Lend-Lease Act* merupakan pengingkaran terhadap sikap politik isolasionis dan

netralitas Amerika, karena sikap tersebut dianggap tidak tepat untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan Amerika dalam menghadapi menguatnya Jerman. Untuk mendapatkan keamanan tersebut, Amerika menghasilkan kebijakan yang pada masa selanjutnya mengubah arah pandangan dan politik luar negeri isolasionisnya.

Pada dasarnya, politik luar negeri Amerika membentuk pola siklus antara intervensionis dan isolasionis, atau menurut Klingberg, *ekstrovert* dan *introvert*.¹ Amerika mengisolasi diri pada masa-masa tertentu seperti pada masa sebelum Perang Saudara dan sebelum Perang Dunia II, tetapi meningkatkan intervensinya sebagai negara berkekuatan besar pada masa akhir abad ke-19 dengan menginvasi Kuba dan Puerto Rico, pada Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Pada saat *Lend-Lease Act* dikeluarkan, Amerika sedang berada dalam masa isolasionis, yang berarti kebijakan tersebut bertentangan dengan politik luar negerinya.

Dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika yang berubah-ubah merupakan salah satu bentuk pragmatismenya, yaitu mengutamakan tujuan dan kegunaan dari suatu tindakan, dalam hal ini keamanan nasional Amerika, yang ditujukan demi keselamatan seluruh masyarakat Amerika, walaupun *Lend-Lease Act* ini melanggar idealisme publik dan politik luar negeri Amerika saat itu yaitu isolasionisme.

¹ Klingberg, Frank L. 1983. *Cyclical Trends in American Foreign Policy Moods: The Unfolding of America's World Role*. University Press of America.

II. POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA

Politik luar negeri, sebagai alat untuk mencapai atau menjaga kepentingan nasional, merupakan salah satu cerminan pandangan dan sikap suatu bangsa dalam politik internasional. Selain politik luar negeri, negara juga menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat. Magstadt dan Schotten membedakan antara politik luar negeri (*foreign policy ends*) dan kebijakan luar negeri (*foreign policy means*). Politik luar negeri cenderung menggambarkan tujuan negara yang memotivasi tindakannya dalam politik internasional. Politik luar negeri menggambarkan identitas dan sikap suatu negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lain, yang dapat membedakan negara tersebut dari negara lain.

Kebijakan luar negeri adalah bentuk tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkuasa sebagai strategi untuk mencapai tujuan politik luar negeri negara tersebut. Jadi, politik luar negeri cenderung bersifat mengakar dan tetap untuk jangka panjang, sedangkan kebijakan luar negeri cenderung taktis dan dinamis – tergantung berbagai macam faktor dalam dan luar negeri – yang ditujukan untuk mencapai tujuan politik luar negeri.² Untuk mencapai keberhasilan politik luar negeri, diperlukan keseimbangan antara tujuan (*ends*) dan strategi (*means*), karena ketidakseimbangan antara keduanya cenderung meng-

arah pada kegagalan (*foreign policy failure*).³

Politik luar negeri mencerminkan sikap dan karakter suatu negara untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keamanan dan mencapai kepentingannya di dunia internasional. Politik luar negeri negara-negara, termasuk Amerika, mengalami perubahan sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional. Amerika dilihat sebagai negara yang mengalami siklus tergantung keadaan nasional dan internasional saat itu. Klingberg melihat bahwa siklus politik luar negeri Amerika bergerak dari isolasionis menuju intervensionis dan sebaliknya.⁴ Sedangkan Almond menggambarkan siklus politik luar negeri Amerika lebih luas, tergantung suasana hati (*mood*) publik dan pembuat keputusan saat itu, di antaranya; *withdrawal* versus *intervention*, optimisme versus pesimisme, toleransi versus intoleransi, dan idealisme versus sinisme.

Pragmatisme adalah filsafat praktis yang mengutamakan manfaat dan pencapaian tujuan dari suatu tindakan menuju kesuksesan.⁵ Filsafat pragmatisme ini lebih mementingkan hasil; sebuah teori yang gagal menjelaskan sesuatu berarti salah, dan teori yang berhasil berarti benar. Formula penting dari pragmatisme

²Magstadt, Thomas M. and Peter M. Schotten. 1996. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues*. New York: St. Martin's Press. 4th ed.

³ Stevens, David. and Matthew S. Winters. 2006. "When The Means Become the Ends: Two Novel Pathways to Foreign Policy Failure". *International Studies Association Annual Conference 2006*. San Diego, California.

⁴ Klingberg. 1983. *Op cit*.

⁵Riley, Woodbridge. 1959. *American Thought: From Puritanism to Pragmatism and Beyond*. Gloucester: Peter Smith.

adalah personalisme dan dinamisme. Seseorang dapat menilai kebenaran atau keampuhan suatu teori atau metode dalam mencapai tujuannya tergantung dari keberhasilan mencapai tujuan tersebut. Doktrin personalisme yang terdapat di dalam prinsip pragmatisme mendorong agresivitas yang menekankan pada *self-sufficingness*. Apabila suatu teori tidak berhasil, seseorang dapat mengganti dengan teori lain selama itu akan membantu keberhasilannya. Dalam dunia pragmatisme, tidak ada yang tidak mungkin; dunia dapat dibentuk sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga semua orang bukan lagi manusia, melainkan *superman*.

III. PRAGMATISME AMERIKA: SIKAP POLITIK LUAR NEGERI

Sikap bangsa Amerika berdasarkan pada pragmatisme karena dianggap sebagai jawaban yang tepat bagi pencapaian tujuan hidup. Untuk mencapai tujuan berdasarkan landasan pragmatisme, bangsa Amerika percaya akan pentingnya pengalaman di masa lampau untuk menentukan langkah berikutnya. Begitu juga dengan politik luar negeri, Amerika belajar dari pengalaman diplomatik dalam mengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri.⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa pragmatisme adalah sebuah metode pengujian yang empiris, dan bukan metafisik yang mengandalkan rasionalitas dan perasaan.

⁶ Minderop, Albertine. 2006. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pragmatisme merupakan bentuk pemikiran yang lahir setelah evolusi berbagai pemikiran di Amerika selama puluhan tahun. Bangsa Eropa yang datang pertama kali ke Amerika masih membawa ajaran-ajaran Puritanisme yang berasal dari Calvinisme di Eropa. Ajaran ini menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang walaupun bekerja keras untuk mencapai tujuannya, tetap pasrah pada kehendak Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya ajaran agama dianggap tidak dapat memuaskan keinginan masyarakat Amerika yang besar sehingga mereka mulai gelisah dan mencari jawaban lain sehingga muncullah masa pencerahan (*enlightenment*), yang telah duluan muncul di Eropa. Pemikiran ini membuka mata manusia akan pentingnya empiris dan sains, bahwa akal dan kemampuan manusia juga diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini mengarah pada lahirnya era Industrialisasi, namun bangsa Amerika sekali lagi gelisah dengan kekeringan rohani dan materialisme yang melanda jiwa mereka. Lalu muncul pemikiran transendentalisme Amerika yang mencoba menggabungkan spiritualitas dengan kesuksesan duniawi. Transendentalisme mencoba mengingatkan manusia Amerika untuk kembali ke alam dan keIlahian di samping kemandirian individu dalam mencari kebenaran dengan menjaga budi pekerti. Transendentalisme Amerika ini akhirnya tidak populer di Amerika karena dianggap menghambat ambisi Amerika yang sangat besar. Pragmatisme, pada akhirnya, dipandang sebagai cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan, terutama kebahagiaan individu.

Sikap hidup masyarakat Amerika tersebut akan tercermin dalam berbagai bidang kehidupan; ekonomi, sosial, dan politik. Adalah penting untuk mengetahui karakteristik masyarakat Amerika untuk menganalisis sikap dan politik luar negerinya. Salah satu hal yang menonjol dalam karakter masyarakat Amerika adalah dualisme moral, yaitu pentingnya pencapaian kebahagiaan individu melalui kesuksesan materialistis sebagai jalan menuju pemuasan kebutuhan moral dan spiritual. Hal ini terutama disadari oleh Alexis de Tocqueville, Charles Dickens, dan Geoffrey Gorer.⁷

Dalam kebijakan luar negeri, masyarakat Amerika juga menyadari adanya dilema antara mempertahankan idealisme dan strategi yang adakalanya justru bertentangan dengan idealisme tersebut. Amerika telah dikecam sebagai negara yang menerapkan standar ganda; sebagai contoh negara demokrasi dan menegakkan hak-hak individu tetapi juga menggunakan cara-cara represif untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Cara represif jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Almond⁸ menyebutkan bahwa siklus politik luar negeri Amerika salah satunya yaitu antara idealisme dengan sinisisme. Siklus ini merupakan salah satu bentuk sikap pragmatisme Amerika yang menganggap bahwa metode atau strategi paling benar adalah yang menghasilkan

penyelesaian secara maksimal dan kepuasan pada yang mencetuskan. Oleh sebab itu siklus ini juga akan tergantung pada hasil akhir yang akan ditemui dari strategi kebijakan luar negeri tertentu.

IV. PRAGMATISME POLITIK LUAR NEGERI PADA PEMBERLAKUAN *LEND-LEASE ACT 1941*

Untuk melihat sikap politik luar negeri Amerika pada saat dikeluarkannya *Lend-Lease 1941*, perlu dilihat politik Amerika dan kondisi internasional beberapa tahun ke belakang. Amerika yang baru saja merasakan kegagalan Perang Dunia I trauma dengan alasan terlibatnya Amerika ke dalam perang yaitu idealisme dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, liberalisme, dan internasionalisme. Presiden Woodrow Wilson yang berjanji akan menghindari Amerika dari perang justru menjerumuskannya, terdorong oleh kuatnya idealisme ini. Amerika bahkan tidak jadi bergabung dengan League of Nations yang telah dibentuk Presiden Woodrow Wilson setelah Perang Dunia I karena dianggap akan merusak sikap isolasionisme dan menarik Amerika ke dalam aliansi yang lain.

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Amerika kembali mendukung sikap isolasionismenya yang terganggu oleh perang dan melakukan apapun untuk tidak terlibat ketegangan yang terjadi di Eropa. Isolasionisme merupakan idealisme yang harus dijaga untuk menjaga idependensi politik dan nilai-nilai moral. Keberpihakan pada suatu pihak akan menyebabkan tesaletnya AS ke dalam perang, yang akan

⁷ Almond, Gabriel A. 1960. *The American People and Foreign Policy*. New York: Frederick A. Preager, Inc.

⁸ Almond, 1960. *Op cit*

memakan korban dan biaya yang tidak sedikit. Nilai-nilai kemanusiaan dan moral juga merupakan hal-hal yang dilanggar pada masa perang. Selain itu, terlibatnya Amerika pada Perang Dunia I dianggap sebagai kesalahan besar dan tidak perlu diulangi lagi. Pengalaman inilah yang menjadi landasan bagi Amerika untuk kembali pada isolasionisme, yang telah mendominasi politik luar negeri Amerika sejak Deklarasi Kemerdekaan. Amerika, sebagai bangsa imigran dari Eropa yang mencari harapan ke dunia baru, memilih untuk tidak terlibat dengan dunia luar yang telah ditinggalkannya.

Terjadinya krisis ekonomi *Great Depression* pada akhir dekade 1920-an menyebabkan Amerika sibuk mengurus dirinya sendiri. Memanasnya suasana di Eropa pada dekade 1930-an akibat ekspansi kekuatan fasis oleh Adolf Hitler di Jerman dan Benito Mussolini di Italia mendorong Amerika mengeluarkan *The Neutrality Acts* yang dirumuskan dari tahun 1935 hingga 1937. Hal ini tidak lebih dari usaha untuk mempertahankan idealisme Amerika, yaitu menjaga agar politik Amerika independen dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa publik Amerika senantiasa mengikuti konflik di Eropa dan di bagian dunia lain dan mulai merasakan simpati pada negara-negara korban serangan Jerman dan Italia.

Sejak awal abad ke-20 Amerika telah merasakan kekaguman namun juga ancaman pada perkembangan Jerman. Amerika dan Jerman merupakan dua negara kuat yang baru muncul di dunia internasional

saat itu. Namun, Jerman sangat berbeda dari Amerika dalam ideologi, terutama setelah Hitler berkuasa yang menumbuhkan fasisme. Agresivitas Jerman yang semakin meningkat membuat Amerika khawatir akan jatuhnya Eropa ke bawah kekuasaan Jerman. Apabila seluruh Eropa dapat dikuasai, maka Jerman akan menguasai perairan Atlantik Utara dan menjadi ancaman bagi Amerika.⁹

Sentimen ini terjadi lagi pada saat menjelang Perang Dunia II. Walaupun publik Amerika menolak segala bentuk intervensi dalam perang, terlihat jelas bahwa masyarakat mulai berpihak pada negara-negara korban invasi Jerman dan sekutunya dalam poros Axis. Ketika negara-negara agresor berhasil mengalahkan lawan, publik dilanda simpati terhadap negara-negara yang kalah. Kekalahan negara-negara tersebut berarti kejayaan untuk kekuasaan fasis yang serta merta bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi AS.

Keberpihakan ini merupakan godaan terhadap isolasionisme Amerika. Namun, sepanjang dekade 1930-an, Amerika masih dapat mempertahankan isolasionismenya karena ancaman belum terasa dekat. Dalam kampanye pemilihan presiden tahun 1940, Roosevelt berjanji dalam pidatonya untuk tidak melibatkan Amerika ke dalam perang: "*I have said this before, but I shall say it again and again and again; your boys are not going to be sent into any*

⁹ Osgood, Robert O. *Ideals and Self Interest of America's Foreign Relations*. 1961. 3 eds. Kingsport: Kingsport Press.

foreign wars."¹⁰ Kampanyenya ini sesuai dengan harapan dan sentimen masyarakat saat itu yang lebih mendukung non-intervensionisme. Akan tetapi, ia juga mengungkapkan bahwa ia tidak akan tinggal diam apabila Amerika diserang oleh kekuatan asing, dengan kata lain ia tidak akan segan-segan untuk berperang.¹¹

Presiden Roosevelt pada dasarnya percaya pada idealisme bahwa Amerika bertanggung jawab menjaga perdamaian, nilai-nilai demokrasi, dan kehidupan yang lebih baik di dunia. Namun, ia juga bersimpati pada negara-negara demokratis yang dijatuhkan oleh kekuatan fasis.¹² Ia bersedia memberikan bantuan peralatan militer kepada Inggris yang dalam keadaan terdesak dengan sistem *cash and carry*. Sistem juga memperlihatkan sisi pragmatisme Amerika, yaitu selain tujuan membantu Inggris dalam perang, sistem ini juga menguntungkan Amerika yang sedang membangun industri sebagai usaha untuk keluar dari Great Depression.

Seiring dengan berjalannya waktu, terutama dengan jatuhnya Prancis dan negara-negara Benelux ke tangan Jerman, Amerika mulai merasakan ancaman Jerman. Amerika dan Jerman saat itu hanya dibatasi oleh Inggris yang tinggal

sendirian mempertahankan wilayahnya. *Battle of Britain* membuka pandangan rakyat Amerika bahwa ancaman sudah dekat. Sebagai akibatnya, publik terpecah ke dalam dua kubu yaitu pendukung isolasionisme dan intervensionisme. Pandangan yang berbeda ini menyebabkan Senat juga terbagi ke dalam kelompok isolasionis dan intervensionis, di mana kelompok intervensionis mempunyai jumlah yang lebih besar.

Pada saat rancangan peraturan *lend-lease* diajukan di Senat, terdapat tantangan dari kelompok isolasionis. Mereka berpendapat bahwa *lend-lease* tersebut secara perlahan-lahan akan meningkatkan campur tangan dalam perang hingga akhirnya Amerika terlibat langsung dalam peperangan. Selain itu, kemenangan Axis di Eropa Barat dianggap tidak akan menimbulkan risiko lebih tinggi dibandingkan tindakan *lend-lease* itu sendiri.

Pandangan isolasionis ini merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi dan liberalisme Amerika. Perang, menurut mereka, adalah hal yang bertentangan dengan idealisme dan peran Amerika sebagai model negara demokrasi. Burton K. Wheeler, Senator Montana memimpin penolakan ini dengan menyebut Roosevelt sebagai presiden yang *war-minded*, totalitarian dan menarik Amerika untuk melanggar hukum internasional.¹³

Pada akhirnya, kelompok mayoritas, yaitu intervensionis memenangkan voting sehingga *Lend-Lease Act* disetujui Senat. Sebelumnya

¹⁰http://www.usnews.com/usnews/document/s/docpages/document_page71.htm (diakses pada 23 Desember 2008).

¹¹Combs, Jerald A. 1986. *The History of American Foreign Policy*. New York: Newberry Award Record, Inc.

¹²Sherwood, Robert E. dalam Osgood. 1961. *Roosevelt and Hopkins*. Kingsport: Kingsport Press.

¹³Combs. 1986. *Op cit*.

Roosevelt telah mengatakan kepada Senat bahwa Amerika harus menjadi “*the great arsenal of democracy*”, untuk mempertahankan diri dari bahaya yang mengancam apabila *Axis* berhasil menguasai Eropa Barat dan Inggris. Mayoritas Senat mendukung berlakunya *lend-lease* ini dengan alasan; (a) untuk menjaga kepentingan dan keamanan Amerika apabila Jerman berhasil menguasai Inggris dan seluruh Eropa; (b) dengan bantuan Amerika kepada negara-negara yang berperang melawan Jerman, diharapkan bahwa perang tidak merambah ke Amerika dan dengan sendirinya menjaga perdamaian dalam negeri.¹⁴ Menjaga perang terjadi di luar Amerika sangat penting bagi keamanan rakyat Amerika. Oleh sebab itu Amerika memutuskan lebih memerlukan intervensionisme dibandingkan isolasionisme.

V. PENUTUP

Dalam keputusan kebijakan luar negeri ini, masyarakat Amerika berkali-kali melihat ke pengalaman di masa lampau untuk menghasilkan strategi dan metode yang dianggap paling menguntungkan posisi dan keamanan nasional Amerika. Isolasionisme telah menjadi sikap politik bangsa Amerika sejak berdirinya negara Amerika Serikat. Namun, sikap ini lebih banyak dilanggar karena tindakan sebaliknya, yaitu intervensionis, dianggap lebih mampun untuk menangani masalah.

Politik luar negeri isolasionis Amerika merupakan salah satu metode dalam menjaga kepentingan

nasional dan keamanan Amerika. Amerika sangat mempertimbangkan keselamatan warga negaranya, oleh karena itu perang bukanlah opsi yang pantas untuk negara tersebut. Akan tetapi, menjelang Perang Dunia II, ketegangan di Eropa dapat berdampak pada Amerika dan membahayakan keamanan dan posisi Amerika di dunia internasional. Oleh sebab itu Amerika meninggalkan politik luar negeri isolasionismenya dan menjalankan kebijakan *Lend-Lease Act* 1941, sebuah langkah yang mengarah pada politik luar negeri intervensionis. Dengan *Lend-Lease Act 1941*, Amerika dapat membantu Inggris menghadang kekuatan Jerman yang berarti juga menjaga perang terjadi di luar Amerika sehingga tidak mengorbankan rakyat sipil.

Dapat dilihat bahwa pragmatisme Amerika telah memilih intervensionisme di atas isolasionisme. Bantuan Amerika kepada Inggris adalah metode terbaik untuk mempertahankan wilayah Amerika pada saat itu. Sampai saat ini publik Inggris dan Amerika tidak bisa membayangkan apabila Jerman berhasil memenangkan *Battle of Britain* dan menguasai Inggris. Oleh sebab itu banyak pihak yang memuji keputusan Amerika untuk terlibat dalam membantu Inggris melawan Jerman. Akan tetapi, para pendukung idealisme percaya bahwa tindakan tersebut lebih berisiko dibandingkan apabila Jerman berhasil menguasai Inggris. Mereka menganggap keberanian Amerika untuk mempertahankan idealisme non-intervensi lebih berharga; apabila tindakan isolasionisme adalah kebenaran yang dipercaya rakyat Amerika, maka Amerika tidak perlu takut pada apapun. Namun hal

¹⁴ Osgood. 1961. *Op cit*

ini tidak berlaku dalam pragmatisme, karena kebenaran adalah segala sesu-

atu yang menghasilkan keberhasilan maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Almond, Gabriel A. 1960. *The American People and Foreign Policy*. New York: Frederick A. Preager, Inc.
- Combs, Jerald A. 1986. *The History of American Foreign Policy*. New York: Newberry Award Record, Inc.
- Klingberg, Frank L. 1983. *Cyclical Trends in American Foreign Policy Moods: The Unfolding of America's World Role*. University Press of America.
- Magstadt, Thomas M. and Peter M. Schotten. 1996. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues*. New York: St. Martin's Press. 4th ed.
- Minderop, Albertine. 2006. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Osgood, Robert O. 1961. *Ideals and Self Interest of America's Foreign Relations*. 3 eds. Kingsport: Kingsport Press.
- Riley, Woodbridge. 1959. *American Thought: From Puritanism to Pragmatism and Beyond*. Gloucester: Peter Smith.
- Stevens, David. and Matthew S. Winters. 2006. "When The Means Become the Ends: Two Novel Pathways to Foreign Policy Failure". *International Studies Association Annual Conference 2006*. San Diego, California.